

STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM EKONOMI KREATIF TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOTA PALEMBANG

Lisa Sri Ningsi, Yeyen Kardila, Dea Mandriana, Renaldi Syaban, Maya Panorama
UIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan
Email : lisasriningsi@gmail.com

Abstrak:

Dalam persoalan penyamaan visi dan misi collaborative governance demi mencapai tujuan bersama. Kota Palembang berupaya sebagai kota kreatif yang di dukung dengan adanya program ekonomi kreatif. Penelitian ini dimaksudkan agar bisa mengetahui serta menganalisis strategi collaborative governance dalam mendukung kegiatan ekonomi kreatif di kota Palembang dan mengidentifikasi hal-hal apa yang menjadi pendukung dan penghambat dari langkah kolaborasi program ekonomi kreatif. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan juga data sekunde, sedangkan untuk teknik pengambilan data dilakukan melalui carateknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance pada program ekonomi kreatif di Kota Palembang terealisasi dengan cukup baik. Saran yang berhubungan dengan penelitian ini ialah bisa mempercepat penerbitan dasar hukum tentang tim pelaksana ekonomi kreatif, meningkatkan kemampuan anggota dengan cara memperbanyak studi banding dengan kota lain, dan juga mengikutsertakan sub-sektor lainnya jika ada perlombaan yang akan di ikuti.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Pembangunan*

Abstract:

Efforts to align the collaborative governance vision and mission to achieve common goals. Palembang city aspires to be a creative city supported by creative industry programs. This study aims to identify and analyze collaborative governance strategies to support creative industries identify the program in the Palembang city and the factors that support and hinder the cooperation process of programs in the creative industries. This type of research methods. The type of data used in the this study are primary and secondary data during data collection. Techniques were performed through observation, interviews, and documentation techniques. Result of this study suggests that collaborative governance in urban creative industries programs. City Palembang is realized quite well. Suggestions related to this research are to speed up the issuance of the legal basis for the creative economy implementing team, increase the ability of members by increasing comparative studies with other cities, and also involving other sub- sectors if there is a competition to be followed.

Keywords: Keyword : *Collaborative Governance, Creative Economy, Economy Development*

Pendahuluan

Collaborative governance adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam mewujudkan kepentingan instansi masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. (Cordery, 2004; Harteman et al., 2002). Dalam collaborative governance akan menemui banyak kendala jika ada banyak mengalami hambatan pada kebijakan hirarki organisasi, masih kurangnya keyakinan pemerintah, adanya ketidakpercayaan penduduk, kurangnya informasi, terbatasnya sumber daya manusia dan kurang terlibatnya stakeholder lain seperti kapasitas pemerintahan local. Hal ini bisa diartikan bahwa collaborative governance sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan yang dikendaki, jika collaborative governance berjalan secara benar serta maksimal maka tujuan dicapai secara efektif antara pemerintah dan kelompok kepentingan yang relevan.¹

Collaborative governance bertujuan untuk memecahkan masalah atau konten tertentu pada pihak terikat. Pihak ini tidak terbatas pada organisasi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan serta pengambilan keputusan. Dalam perencanaan tujuan, visi misi, norma dan juga nilai bersama dalam kerja sama, posisi setiap anggota adalah sebanding yang berarti mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan secara bebas meskipun dibatasi pada kesepakatan bersama Pemerintahan yang disusun collaborative governance yang didalamnya terdapat public dan instansi pemerintahan pada proses musyawaran pengambilan kesepakatan bersama yang sifatnya resmi, berorientasi berdasarkan kesepakatan dan pembagian kebijakan atau dalam mengelola program public serta asset public (Chris Ansel & Alison Gash, 2007).²

Potensi besar ekonomi kreatif menjadi bagian dari sektor yang sangat berperan bagi Indonesia untuk merealisasikan Negara yang independen, adil, makmur serta maju. Di Indonesia sumber daya ekonomi dikelola secara berlimpah, yakni SDM kreatif dalam kapasitas yang besar, SDA yang melimpah, serta warisan budaya yang beraneka ragam dan unik. Ketiga hal itu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Di Indonesia, industri kreatif tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, non-ekonomi, kebangsaan aspek progresif kualifikasi nasional. Melalui industri kreatif mempromosikan citra dan identitas nasional, mengembangkan sumber daya terbarukan, mendorong pertumbuhan inovasi kreatif dalam negeri. Industri kreatif memiliki dampak sosial yang positif bagi masyarakat, termasuk penguatan kehidupan pemerintahan, peningkatan toleransi serta pemertaan kesejahteraan masyarakat.

¹ Ansell, C. & Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory Advance, Issue DOI: 10.1093/jopart/mum032. Source : OAI, 1-29.

² Creswell, John W. 2014. Desain Penelitian (kualitatif, kuantitatif dan campuran) perpustakaan mahasiswa

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 142 tahun 2008 tentang masterplan pengembangan ekonomi creative nasional 2008-2025 ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari satu gagasan yang mengandung satu teori sinilane. Kearifan Indonesia yang inovatif berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan warisan budaya dan teknologi adalah kekayaan intelektual. Untuk meningkatkan daya saing kontribusi upaya ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional memerlukan langkah strategi pengembangan ekonomi kreatif jangka panjang, dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam bekerja sama. Mengembangkan ekonomi kreatif nasional secara terpadu dan perlunya kerja sama harus didukung oleh kreativitas dan inovasi sumber daya manusia dalam pengembangan usaha yang inovatif di tuangkan dalam bentuk rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional yang sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.³

Referensi pengembangan industri kreatif di Kota Palembang (berdasarkan RPJMB) Kota Palembang 2018-2023 mengacu pada misi keempat Palembang Gold Darussalam 2023. Dengan kata lain, terwujudnya perekonomian yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi. Tujuan dari misi keempat ini adalah untuk memungkinkan kita mencapai pertumbuhan ekonomi yang meningkat adil dan berfokus pada komunitas berdasarkan inovasi dan desain sangat kompetitif dengan tujuan mengembangkan ekonomi lokal secara terarah.

Dalam mendukung kiprah ekonomi kreatif pertumbuhan ekonomi wilayah telah relative terlihat khususnya mengenai penyerapan energy kreatif, terkait sumbangan devisa yaitu menggunakan adanya aneka macam barang contohnya kain songket, pempek & kerajinan tangan. Dapat kita lihat menurut syarat waktu ini banyak warga yang bekerja pada aneka macam UKM & IKM antara lain masakan (pempek), kriya (songket dan ukiran). Peran pelaku ekonomi kreatif pada bidang masakan berperan sangat akbar misalnya masakan pempek yang sudah mendunia. Sub-sektor memasak memiliki pasar yang sangat besar untuk mendorong perekonomian masyarakat. Untuk pengembangan kerajinan dan fashion kota Palembang diberdayakan untuk mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, dan mempromosikan pariwisata melalui sanggar seni tari dll. Tentang teknik yang digunakan industri kreatif kota Palembang (berdasarkan jawaban atas pertanyaan kunjungan kerja komite X DPR RI).⁴

- a. Bergabung di training untuk berbagi ilmu dan berita memperluas akses para pelaku industri kreatif.
- b. Bekerjasama dengan pemerintah khususnya dibidang industri kreatif, mempromosikan dan mewujudkan produk dan potensi Dinas Pariwisata Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang dan pemangku kepentingan industri kreatif.
- c. HKI memiliki kekuatan regulasi yang kuat untuk menegaskan pemilik karya seni untuk hak-hak tertentu yang mungkin telah mereka terima secara fisik atau ideal, sehingga memungkinkan komunitas dan peserta industri kreatif melindungi karya produk karya mereka masing-masing

³ Irawan, Denny. 2016. Collaborative Governance. Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya, 121.

⁴ Dwiyan, agus. 2010 Manajemen pelayanan publik : peduli, inklusif dan kolaboratif. Gajah Mada Universitas, Graha press Yogyakarta, 321.

- d. Merancang strategi yang sinkron dan berkelanjutan.
- e. Strategi pemasaran yang digunakan yang utama adalah pemasaran online, selain riset pasar untuk mengidentifikasi produk yang dibutuhkan warga atau instansi, seperti contoh poster Ampera.
- f. Strategi manajemen meminimalisir modal juga diterapkan untuk memproduksi barang bekas cocok untuk dijual setelah perbaikan.
- g. Meningkatkan pengetahuan industry kecil dan menengah melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan inovasi dan ide kreatif. Untuk menentukan ukuran yang digunakan untuk program, kualitas adalah kinerja. Tujuan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dapat dilihat dari jumlah pelaku ekonomi kreatif dan total output pelaku ekonomi kreatif tersebut. Pencapaian kualitas membutuhkan komitmen terhadap implementasi program kegiatan sesuai dengan dokumen yang dibuat. Pemkot Palembang telah mengeluarkan SK Walikota Palembang 144/KPTS/DISPERINDAGKOP2016 penciptaan sentra industry kecil dan menengah

.Walikota memutuskan resolusi Small Business Center sebagai berikut:

- a) Sentra kecil dan menengah songket di Kelurahan 30 Ilir & 32 Ilir Kecamatan Ilir II
- b) Sentra tekstil kecil dan menengah tenun di Kelurahan Tuan Keng Thanh dan desa 14 ulu
- c) Sentra industry ukiran kayu skala kecil dan menengah di desa 19 Ilir Palembang kecamatan bukit kecil dan desa suka bangun, kecamatan sukarami.
- d) Sentra industry kecil dan menengah barang jadi dari bahan rotan di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir II Palembang.
- e) Sentra industry kecil maskan khas Palembang di desa 1 ulu, 3/4 ulu dan 10 ulu kecamatan seberang ulu 1.⁵

Pemediaan produk pempek dan Sumatera Express sebagai pusat media informasi, karena keterbatasan kapasitas sumber daya, pemerintah perlu menetapkan atau menerapkan kolaborasi multi-stakeholder, baik dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Adapun pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam peningkatan industry kreatif di Kota Palembang adalah Pemerintah (Litbang Bapedda, Kementerian Pariwisata, Koperasi, Kementerian Usaha Kecil Menengah, Kementerian Kebudayaan Kota Palembang) bertindak sebagai coordinator produksi dan staf teknis, Lembaga Pendidik atau Universitas Kota Palembang sebagai kolaborasi antara peneliti bisnis dan pemerintah dalam mengembangkan rencana dukungan untuk industry kreatif.⁶

Adanya kekayaan kolaborasi dalam perumusan rencana dukungan untuk industry kreatif peneliti, perusahaan, pemerintah telah menjadi kenyataan, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Substansi yang perlu diatur :

⁵ Public Administration Research and Theory Advance, Issue DOI: 10.1093/jopart/mum032. Source : OAI, 1-29.

⁶ Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia Kota Palembang. 2019, 145.

- a. Kuantitas dan kualitas sumber daya yang berperan sebagai pelaku industry kreatif ketika pengembangan diperlukan untuk lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dll.
- b. Penghargaan atau pengakuan kreatif Indonesia dan karya kreatif yang dihasilkan merangsang pertumbuhan industry kreatif terutama dalam bentuk dukungan finansial.
- c. Mempercepat pertumbuhan teknologi dan non-finansial lembaga keuangan. Dukungan terhadap industry kreatif berdasarkan lemahnya dukungan lembaga keuangan oleh karena itu diperlukan model pendanaan alternative seperti daur ulang.

UU NO 24 Pasal 21 tahun 2019 tentang industry kreatif menyatakan:

1. Pemerintah atau pemerintah daerah mendorong pengembangan system pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual untuk industri kreatif
2. Peraturan tentang kelembagaan pengembangan system pemasaran produk industri kreatif berdasarkan kepemilikan fungsional berdasarkan ayat 1 dan diatur oleh pembatasan pemerintah.

Palembang terkait dengan infrastruktur, system keuangan, mendukung hak milik ekonomi penciptaan. Dapat dipahami bahwa tata kelola kolaboratif memainkan peran penting dalam mencapai tujuan beberapa hal, jika tata kelola koperasi dapat terintegritas dan dioptimalkan dengan baik pemerintah dan pemangku kepentingan tujuan akan tercapai secara efektif. Peneliti yang tertarik pelajari lebih lanjut tentang tata kelola kolaboratif dalam program ekonomi kreatif kota Palembang⁷

Dapat diartikan bahwa Collaborative Governance memegang peranan penting dalam mencapai tujuan. Hal-hal tertentu ketika tata kelola bersama dapat saling terkait secara tepat dan optimal pemerintah dan pemangku kepentingan akan memastikan bahwa tujuan tercapai secara efektif. Peneliti yang tertarik meneliti lebih lanjut tentang tata kelola kolaboratif dalam program industry kreatif perkotaan Palembang

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode Penelitian

Sifat survey ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer dan data sekunder merupakan jenis data yang digunakan pada penelitian ini, serta untuk teknik pengumpulan data sendiri dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.⁸

⁷ Subarusono, Agustinus 2016. Kebijakan Publik dan tata kelola Kolaboratif (tantangan Kontemporer. Penerbit Gava Media ; Yogyakarta, 121.

⁸ Sugishirono. 2013 penelitian penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta, surya brata sumandi 2015 Metodologi penelitian. Raja Grafindo Persada Jakarta, 211.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Kota Palembang Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan industri kreatif Palembang memiliki tiga sektor utama. Sektor industri kreatif, yaitu sektor penyumbang seperti memasak, fashion dan kerajinan tangan dll. Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar 2013 melihat pertumbuhan ekonomi kreatif, laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,74% diatas 5,76%. 2015-2019 kontribusi industri kreatif terhadap PDB seharusnya 7-7,5%. Persyaratan pertumbuhan PDB industri minimal 5-6%.⁹

Menteri perindustrian Saleh Husen mengatakan songket dan adonan masakan adalah produk Pemkot Palembang, ujarnya saat membuka pameran Pameran sriwijaya III digelar di kementerian perindustrian Jakarta.

Kain songket Palembang menyatu dengan batik dengan lain songket dari daerah lainnya seperti Jambi dan Riau. Bidang rasa yang melambatkan kehebatan orang yang mencintai kain songket memakainya. Apalagi Palembang juga menjadi salah satu fokus pengembangan dalam hal kuliner. Selain itu, ada banyak spesies yang berbeda, sampai ke variasi pempek itu sendiri, yang terdiri dari pempek lenjer, kapal selam sampai pempek kulit. Untuk pemasaran sendiri teknologi informasi serta media sosial sebagai saran dimaksimalkan menjadi media pemasaran staf songket dan masakan.

Konsep pembangunan pasar terapung darussalam dan pasar ekonomi kreatif darussalam juga telah di setuju oleh Walikota Harnojoyo yang bertujuan untuk bisa memperkuat ekonomi kerakyatan itu segera ditindak lanjuti. Pemkot Palembang juga akan melibatkan BUMN dan BUMD melalui dana CSR, dan juga bantuan pemerintah pusat, dan APBD di setiap organisasi perangkat daerah yang terkait sebagai sumber untuk pendanaan pembangunan pasar ekonomi kreatif dan pasar apung darussalam.¹⁰

Spesialis tim penilaian mandiri Kabupaten dan kota (PM3KI) Bekraf Yuliana Rini mengatakan akan segera membuat websait kotakreatif.id yang akan mengintegritasi semuanya. Kemungkinan kreatif di seluruh Indonesia. Upaya ini memungkinkan untuk menangkap dan menciptakan ekosistem ini adalah subsector ekonomi dan kreatif khas kota Palembang dan membantu pemerintah kota untuk mempromosikan nya. Hal ini juga mempengaruhi pariwisata di kota Palembang. Jika hasil yang diperoleh dari tes pilih subsector yang akan diisi kotakreatif.id. Bekraf dapat membantu dengan industri seperti pendampingan. Bekraf mengevaluasi subsector Yang diusulkan oleh pemerintah kota Palembang termasuk dalam kota kreatif karena beberapa indikator. Bagaimana distribusi untuk konsumsi seperti apapun yang layak untuk produk kreatif.¹¹

Kerja sama antara kelompok akademis, para pelaku bisnis, perkumpulan, pemerintah serta media (ABCG-M) amat di perlukan untuk mengatasi permasalahan yang dapat memperlambat laju perkembangan ekonomi kreatif. Selain itu juga pihak pemerintah kota Palembang terus mengupayakan untuk menambah serta mengembangkan ruang publik baru seperti memanfaatkan Pedestrian Sudirman serta Kenten Street sebagai wadah untuk komunitas agar

⁹ Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya. 2014, 113.

¹⁰ Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya. 2014.

¹¹ Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya. 2014.

dapat berkomunikasi serta berinteraksi agar bisa berkreasi dan juga berinovasi dengan kreatifitas yang mereka miliki.

Dari bermacam sub-sektor ekonomi kreatif yng terus di kembangkan oleh Pemkot Palembang diharapkan bisa meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat di kota Palembang. Dengan adanya program Ekonomi Kreatif juga diharapkan bisa meningkatkan pembangunan ekonomi yang ada di Kota Palembang, sehingga bisa mencapai kesejahteraan pada masyarakat melalui Program Ekonomi Kreatif. Sumber Daya Manusia menjadi saalh satu aspek yang berperan penting pada pembangunan ekonomi di setiap daerah, SDM yang baik akan menghasilkan ekonomi yang baik dalam perekonomian.¹²

Definisi, Tujuan, Manfaat dan Pendekatan Prestasi Collaborative Governance

Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai collaborative governance, sebelumnya perlu mengetahui tentang governance. Governance asal katanya diambil dari kata “gevern” yang memiliki arti mengambil peranan yang besar, yang terdiri dari keseluruhan proses, aturan serta lembaga yang memiliki kemungkinan pengeloan juga pengendalian masalah kolektif di masyarakat. Dalam artian yang lebih luas governance termasuk keseluruhan dari semua lembaga serta unsur masyarakat, baik itu dari pemerintah ataupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015:251).

Adapun beberapa ahli yang mengemukakan mengenai definisi dari governance ini diantaranya Chema dalam Kebam (2008:38), governance di definisikan sebagai suatu system, nilai serta kelembagaan yang mana menangani masalah ekonomi, sosial, politik dikelola dari interaksi masyarakat, pemerintah dan sector swasta. Karena hal tersebut institusi governance ini terdiri dari tiga domain yakni state (Negara maupun pemerintah), private sector (sector swasta dan kegiatan usaha) serta yang terakhir adalah society (masyarakat) yang saling berhubungan serta menjalankan fungsi masing-masing (Sedarmayanti, 2003:5).

Menurut Ansell dan Gash (2007:546) Collaborative governance berarti bersama. Pemerintah sebagai seperangkat aturan dimana salah satu otoritas public berpartisipasi langsung kepada pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan formal, berorientasi konsensus dan deliberatif untuk implementasi mengelola peraturan atau program publik. Selain itu, ada pendapat lain tentang definisi tata kelola kolaboratif diusulkan oleh Agranoff dan McGuire. Dalam Chang (2009:76-77) pemerintah kolektif secara khusus menekankan kerja sama horizontal sukarela. Hubungan lateral antara peserta multi-sektor didorong oleh tuntutan klien, seringkali mentransfer keterampilan dan peran dalam badan public. Kolaborasi ini diperlukan untuk membuat pemerintah lebih terstruktur dan efektif dan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk mengelola lintas batas organisasi dan departemen.¹³

¹² Dwiyant, agus. 2010 Manajemen pelayanan publik : peduli, inklusif dan kollaboratif. Gajah Mada Universitas, Graha press Yogyakarta, 112.

¹³ <https://www.kompasiana.com/syahrufendit/ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan-prospeknya>. Diakses pada 26 Januari 2019 Pukul 20.39 WIB

Tujuan Melaksanakan Collaborative Governance

Ada berbagai alasan untuk kerjasama lembaga individu. Korespondensi Junaidi (2015:8) mengatakan bahwa tata kelola kolaboratif tidak muncul secara tiba-tiba. Karena ini atas inisiatif berbagai pihak bekerja sama dan berkoordinasi untuk memecahkan masalah dimasa depan propaganda. Menurut Ansell dan Gash (2007:54), administrasi pemerintah mengatasi tingginya biaya akibat lemahnya penegakan hukum dan politisasi regulasi. Berdasarkan keyakinan bahwa tata kelola kolaboratif mungkin atau mungkin muncul. Sana seperti itu, tetapi berdasarkan aspek yang berbeda. Bisa melihatnya dari segi kebutuhan kelembagaan kerja sama antar lembaga karena keterbatasan kapasitas masing-masing lembaga. Lembaga yang menyelenggarakan programnya sendiri, karena keterbatasan sumber anggaran lembaga, kerja sama anggaran ini tidak berakhir disitu. Tidak hanya dari satu instansi, tetapi juga dari instansi yang lain terlibat dalam kerja sama tersebut. Kerja sama sebagai salah satu aspek perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya munculnya konsep berbagai Negara, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaannya.¹⁴

Kolaborasi juga disebut sebagai alternative untuk mengembangkan keterlibatan kegagalan kepentingan kelompok dan kepengurusan salah satu organisasi. Kompleksitas yang timbul dalam perkembangannya mengarah pada kondisi yang saling memperkuat menyebabkan meningkatnya permintaan untuk saling ketergantungan dan kerjasama antar lembaga.¹⁵

Penutup

Dalam upaya untuk penyamaan visi dan misi collaborative governance demi mencapai tujuan bersama. Kota Palembang berupaya sebagai kota kreatif yang didukung dengan adanya program ekonomi kreatif. Collaborative governance yang mendukung program industri kreatif di kota Palembang. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat proses program kerja sama industri kreatif.

Pembangunan dan pengembangan kuliner, fashion dan pasar apung yang baik tentunya diperlukan pendekatan kreatif serta inovatif dengan cara memunculkan karakter budaya yang dapat menarik banyak orang mencobanya. Salah satu bentuk untuk pendekatan inovasi ini dilakukan pemerintah kota Palembang melalui Disperaktif adalah dengan melakukan perencanaan kerja sama pada semua stakeholder serta elemen lapisan masyarakat guna mendukung komitmen dalam pembangunan ekonomi kreatif di kota Palembang. Konsep kerja sama pemerintah tersebut sama dengan konsep yang terdapat di collaborative governance. Pendekatan kolaborasi akan menghasilkan inovasi-inovasi kebijakan serta pembangunan yang berkesinambungan sebagai prioritas pembangunan ekonomi kreatif yang berkualitas.

Pembangunan ekonomi kreatif pada tingkatan kota dan daerah kota Palembang, haruslah menjadi salah satu elemen yang penting untuk proses kolaborasi pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan faktor serta elemen kolaborasi

¹⁴ <https://www.kompasiana.com/syahrulendit/ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan-prospeknya>. Diakses pada 26 Januari 2019 Pukul 20.39 WIB

¹⁵ Subarusono, Agustinus 2016. Kebijakan Publik dan tata kelola Kolaboratif (tantangan Kontemporer. Penerbit Gava Media ; Yogyakarta, 112.

Daftar Pustaka

- Creswell ,John W. 2014. Desain Penelitian(kualitatif,kuantitatif dan campuran) perpustakaan mahasiswa
- Dwiyant,agus.2010 Manajemen pelayanan publik : peduli,inklusif dan kollaboratif. Gajah Mada Universitas, Graha press Yogyakarta
- Sabardi,Abdul 2015 Manajemen kolaboratif dalam pelayanan publik : teori konsep dan publikasi Graha Ilmu ; Yogyakarta
- Subarusono,Agustinus 2016. Kebijakan Publik dan tata kelola Kolaboratif (tantangan Kontemporer. Penerbit Gava Media ; Yogyakarta
- Sugishirono.2013 penegrtian penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta,surya brata
- sumandi 2015 Metodologi penelitian. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Ansell, C. & Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory Advance, Issue DOI: 10.1093/jopart/mum032. Source : OAI,
- Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia Kota Palembang. 2019
- Irawan, Denny. 2016. Collaborative Governance. Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya.